

**LAPORAN MAGANG MAHASISWA**

**BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**(Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah  
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Pada  
Tahun 2015-2020)**



**NABILLA DEA FATRA**

No. Mahasiswa : 18312341

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN  
UKURAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI PADA 2015-2020**

Laporan Magang Mahasiswa

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika UII

Oleh:

**Nabilla Dea Fatra**

No. Mahasiswa : 18312341

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam karya ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Tangerang, 17 Maret 2022

Penulis,



Nabilla Dea Fatra

**LAPORAN MAGANG MAHASISWA**

**BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**(Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ukuran  
Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota  
Bukittinggi Pada 2015-2020)**

Dibuat oleh:

**Nabilla Dea Fatra**

No. Mahasiswa : 18312341

Disahkan oleh,

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Mahmudi M.Si., CMA

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG / WIRAUSAHA**

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerinta Kota Bukittinggi pada Tahun 2015-2020**

Disusun Oleh : Nabilla Dea Fatra

Nomor Mahasiswa : 18312341

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Kamis, 07 April 2022

Penguji/ Pembimbing TA : Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak., CMA.

Penguji : Reny Lia Riantika S.E., Ak., M.Acc.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN MOTTO

*“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka  
jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan  
hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

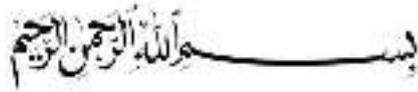
*(Q.S Al-Mulk Ayat 15)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Atas rasa syukur*

*Laporan magang ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, kedua saudara, keluarga, dan seluruh pihak yang memberikan dukungan serta semangat dalam setiap proses dan perjalanan saya menjalankan studi.*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT untuk berkah serta hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada seluruh umat-Nya dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat yang diberikan, penulis dapat dimudahkan selama proses penulisan laporan akhir magang sehingga dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020”. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penyusunan laporan akhir magang ini terdapat beberapa kendala serta hambatan yang terjadi. Akan tetapi, dengan seluruh dukungan serta arahan dari berbagai pihak membuat penulis dapat melaluinya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materiil dalam penyusunan laporan akhir magang ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Mahmudi M.Si., CMA yang telah memberikan arahan serta saran yang sangat berharga selama menyusun seluruh laporan, mulai dari proposal magang, laporan tengah magang, hingga laporan akhir magang. Terima kasih atas waktu dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
2. Para dosen serta staf Akuntansi FBE UII yang telah memberikan ilmu, arahan, saran serta pelayanan yang sangat membantu penulis selama masa studi.
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Delfi Fatra dan Ibu Yopie yang telah memberikan banyak kasih sayang, semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih atas seluruh pengorbanan yang diberikan demi menjaga,

mendidik, memfasilitasi dan mendo'akan penulis agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses.

4. Kedua saudara laki-laki, Abdul Hadiy Dyo Fatra dan Muhammad Rizki Fatra yang telah memberi dukungan serta semangat selama ini. Terima kasih atas pengertian yang diberikan dan candaan yang membuat penulis terus semangat menyelesaikan studi.
5. Teman-teman selama perkuliahan, Desi, Alya, Sasa, Chika, Agnes, dan Ranti yang telah bersedia berjuang bersama untuk menghadapi seluruh tahap pendewasaan selama masa perkuliahan dan saling mendukung serta memberi semangat. Semoga sukses dan sehat selalu fren, jangan lupa makan.
6. Teman-teman Kopma FBE UII yang memberikan penulis pengalaman berarti dalam pengembangan diri dan peningkatan kemampuan bersosialisasi selama 3 tahun terakhir, terkhusus rekan-rekan pengurus dan pengawas. Terima kasih untuk segala cerita dan rintangan yang telah dilalui bersama.
7. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada penulis selama menjalankan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir magang ini masih terdapat kekurangan, karena yang sempurna hanya milik Allah SWT. Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis juga menjadi faktor yang membuat penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran sangat berarti untuk penulis untuk membangun dan menjadi evaluasi bagi penulis. Semoga laporan akhir magang ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan peneliti lainnya pada penelitian-penelitian berikutnya.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Penulis

Nabilla Dea Fatra

## ABSTRAK

Pengelolaan keuangan merupakan tonggak utama berlangsungnya kegiatan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka urusan pemerintahan dapat terlaksana serta tujuan pemerintah daerah dapat tercapai. Salah satu penilaian terhadap bagaimana pengelolaan keuangan terjadi dapat dilihat dari kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat signifikansi pengaruh dari pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah, khususnya yang terjadi di Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan untuk variabel belanja modal dan ukuran pemerintah berpengaruh negatif atau tidak ditemukan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi.

**Kata kunci :** pendapatan asli daerah, belanja modal, ukuran pemerintah, kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **ABSTRACT**

*Financial management is a main concern for the occurrence of local government activities. A good financial management can make government affairs carried out and local government goals can be achieved. One of the assessments to know how financial management of local governmental occurs can be seen from the financial performance. This research aims to determine the significance of the effect locally generated revenue, capital expenditure, and government size on the financial performance of Bukittinggi local government from 2015-2020. This research used quantitative method by processing secondary data which obtained from Bukittinggi local government financial statement in 2015-2020. Data collection technique used in this research is purposive sampling technique. The result of this research found that locally generated revenue variable has a significant positive effect towards financial performance, meanwhile capital expenditure and government size has a negative effect or has no significant positive effect towards financial performance of Bukittinggi local government.*

**Keywords :** *locally generated revenue, capital expenditure, government size, financial performance of local government.*

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir Magang.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Abstrak .....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Laporan Magang.....	9
1.4. Sistematika Laporan.....	9
1.5. Manfaat Karya Ilmiah .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Keuangan Daerah .....	12
2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
2.3 Pendapatan Asli Daerah .....	17
2.4 Belanja Modal Daerah.....	21
2.5 Ukuran Pemerintah Daerah .....	22
2.6 Penelitian Sebelumnya .....	23

2.7 Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Sumber dan Data Penelitian .....	27
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.4. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
4.1. Profil Perusahaan.....	34
4.2. Aktivitas Magang .....	38
4.3. Hasil Analisis Data.....	81
BAB V PENUTUP.....	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN.....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Ketiga Variabel Bebas Yang Diperlukan .....	29
Tabel 3.2 Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal .....	30
Tabel 4.1 Rincian Aktivitas Magang .....	42
Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	82
Tabel 4.3 Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi .....	38
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 Data Penelitian.....	98
Lampiran 2 Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal .....	98
Lampiran 3 Hasil Transformasi Logaritma Natural (Ln) Variabel Pendapatan Asli Daerah .....	99
Lampiran 4 Hasil Transformasi Logaritma Natural (Ln) Variabel Belanja Modal .....	99
Lampiran 5 Hasil Transformasi Logaritma Natural (Ln) Variabel Ukuran Pemerintah.....	100
Lampiran 6 Perhitungan Nilai T Tabel .....	100
Lampiran 7 Distribusi Nilai T Tabel.....	101
Lampiran 8 Analisis Regresi Linear Berganda .....	102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Keuangan merupakan suatu bidang yang mempelajari cara meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya dalam satuan moneter dalam waktu berjalan, dan juga memperkirakan risiko dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan. Menurut Martono dan Harjito mengartikan *financial* adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, menggunakannya, dan mengelolanya dengan tujuan tertentu. Pada dasarnya keuangan yang dimengerti oleh sebagian masyarakat yaitu menggunakan catatan keuangan dalam rangka mengelola, menjaga serta mengawasi aliran dana mereka. Dalam lingkup negara, keuangan merupakan suatu elemen penting yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan di berbagai bidang sebagai modal atau dana awal melakukan proyek. Keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban milik negara baik dalam bentuk uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan dalam penjelasan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan ada empat pendekatan yaitu dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Masuk ke dalam lingkup yang lebih sempit lagi, terdapat keuangan daerah di mana elemen ini berfungsi sebagai pendukung perkembangan dan pembenahan masing-masing daerah. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat

dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada tingkat daerah sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan lagi yang tujuannya agar masing-masing tingkatan dapat memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang tersedia untuk memajukan dan membenahi daerah lebih maksimal dan terciptanya pemerataan pembangunan. Sumber daya yang dimaksud ialah bagaimana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya daerah mereka seperti hasil tambang, perkebunan, pariwisata dan lain sebagainya agar terus beroperasi dalam jangka panjang. Sumber dana adalah dana - dana yang didapatkan pemerintah baik dari pusat maupun pendapatan daerah mereka yang digunakan sewajarnya sesuai kebutuhan dalam rangka pembangunan dan memperbaiki.

Fungsi dari pemerintahan daerah dapat berjalan maksimal jika didukung dengan pendapatan dari sumber-sumber penerimaan yang cukup dan memadai kepada daerah tersebut. Wujud dari pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan dari APBD tersebut dibentuk berdasarkan kebijakan dan peraturan tertentu agar penyusunannya efektif dan tidak dianggarkan sesuai kepentingan pribadi atau kelompok, di mana fungsi dari pemerintah daerah sendiri yaitu untuk melayani dan menjamin kesejahteraan masyarakat. APBD menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran belanja. Jumlah yang telah disepakati menjadi target serta batasan dalam pelaksanaan tugas oleh pemerintah, di mana realisasi dari anggaran tersebut menjadi salah satu elemen dalam pengukuran

kinerja, sebagai dasar penentuan strategi dan acuan dalam perencanaan untuk periode berikutnya.

Pendapatan daerah dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain yang sah. Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber dana yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan pendapatan daerah lain yang sah merupakan pendapatan-pendapatan sah yang bukan berasal dari apa yang diklasifikasikan sebagai pendapatan di PAD dan dana perimbangan. Dengan cukupnya pendapatan yang diterima, maka diharapkan dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan perkembangan, pemeliharaan dan pengelolaan yang lebih maksimal.

Menurut UU nomor 33 tahun 2004, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah memiliki fungsi untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komposisi belanja daerah pada APBD dibagi menjadi ke dalam empat bagian utama yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya. Belanja daerah ditujukan untuk memenuhi operasional pemerintah dan pembangunan daerah yang tujuannya yaitu untuk memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakat. Dengan diperolehnya pendapatan daerah yang cukup maka daerah semakin mampu membiayai belanja daerahnya, sehingga

dengan tercukupinya fasilitas dan kepuasan masyarakat harapannya kesadaran rakyat untuk menyumbang pendapatan asli daerah melalui pajak daerah semakin tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal adalah bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran yang akan meningkatkan aktiva tetap yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Sehingga dengan terlaksananya belanja modal dengan pertimbangan yang menyesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan, serta dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah dengan memunculkan manfaat ekonomis dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah juga untuk masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan fasilitas umum.

Dengan meningkatnya jumlah aktiva tetap pada neraca, maka akan menambah total keseluruhan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Total aset merupakan salah satu indikator dalam melihat ukuran pemerintah. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas (Damanpour, 1991). Ukuran pemerintah dapat memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan operasional yang nantinya akan dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, belanja modal yang meningkatkan ukuran pemerintah juga diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomis dalam bentuk pendapatan. Dengan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan fasilitas yang memadai, pendapatan asli daerah juga berpotensi akan meningkat.

Peningkatan yang terjadi dari PAD, belanja modal, dan ukuran pemerintah dapat memperlihatkan bagaimana kinerja pemerintah daerah khususnya pada kinerja keuangan, adakah perkembangan setiap tahunnya. Tetapi yang lebih penting lagi yaitu pengukuran kinerja keuangan berdasarkan pencapaian kegiatan menggunakan indikator keuangan yang terjadi pada periode tertentu jika dibandingkan dengan yang dianggarkan untuk periode tersebut. Capaian yang dihasilkan dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran dalam bentuk surplus/defisit. Jika mengalami surplus, berarti kemungkinan pendapatan yang diterima melebihi anggaran dan dapat menutup seluruh biaya yang ada atau terdapat anggaran belanja yang tidak terserap sepenuhnya. Anggaran belanja yang tidak terserap dengan maksimal juga bukan merupakan suatu yang baik, karena pemerintah daerah dianggap tidak menjalankan tugasnya secara maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan.

Sedangkan jika realisasi anggaran mengalami defisit, maka baik pendapatan maupun belanja daerah dipertanyakan. Pendapatan bisa saja tidak memenuhi target atau belanja daerah melebihi target, yang nantinya defisit pada periode tersebut akan menjadi beban di periode selanjutnya. Sehingga kinerja keuangan yang baik yaitu di mana realisasi dari anggaran dapat sesuai dengan yang direncanakan, baik dana yang didapat dan dikeluarkan serta hasil yang memuaskan dari program atau kegiatan yang direncanakan. Kinerja keuangan pemerintah daerah akan mempengaruhi penyusunan anggaran periode selanjutnya, jika anggaran dapat dimanfaatkan secara baik dan menghasilkan

sesuatu yang bagus maka di periode berikutnya pemerintah daerah diharapkan dan dipercaya dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja tersebut.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kondisi pendapatan asli daerah, belanja modal daerah dan ukuran pemerintah Kota Bukittinggi. Bukittinggi merupakan salah satu Kota di Padang, Sumatera Barat yang menjadi *icon* wisata Provinsi Sumatera Barat. Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi sendiri banyak diperoleh dari hasil sektor pariwisata, di mana pada saat libur nasional baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara banyak yang berkunjung karena selain keindahan alam, Bukittinggi juga memiliki banyak cerita dan peninggalan sejarah serta wisata kuliner yang banyak digemari. Untuk PAD dari sumber lainnya tidak begitu signifikan, sehingga pada saat pandemi menyerang PAD sangat terpengaruh akibat sektor pariwisata yang terdampak oleh keterbatasan mobilitas. Pendapatan pajak yang berasal bukan dari sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan di Kota Bukittinggi memang tidak begitu tinggi karena merupakan Kota kecil. Serta PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak begitu berpengaruh karena sedikitnya perusahaan seperti BUMN dan BUMD yang beroperasi.

Belanja modal pada Kota Bukittinggi kurang lebih sama dengan pemerintah daerah lainnya, yaitu membangun dan atau memperbaiki fasilitas umum, membeli perlengkapan kantor penunjang kegiatan seperti laptop, printer dan lain sebagainya. Belanja modal pemerintah daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 146.855.820.104,52 dan tahun dengan belanja modal tertinggi yaitu tahun 2020

dengan total belanja modal Rp. 249.317.613.815,34. Belanja modal Kota Bukittinggi termasuk tinggi jika dibandingkan dengan PAD yang diperoleh. PAD pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2015 - 2020 memiliki rata-rata pendapatan Rp. 89.604.687.353,86. Dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Bukittinggi masih sangat bergantung kepada bantuan dana dari pemerintah pusat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PAD Kota Bukittinggi hanya mengandalkan pajak daerah dari pajak restoran serta hotel dan retribusi daerah yang jumlah tidak begitu tinggi, dikarenakan Kota Bukittinggi merupakan Kota dengan luas yang kecil sekitar 25,24 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 121.028 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi.

Total aset secara keseluruhan Kota Bukittinggi jika dilihat dari pada tahun 2015 - 2020 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2018 dimana adanya penurunan dari total aset tahun 2017. Hal tersebut kemungkinan terjadi akibat adanya penjualan aset yang tidak lagi digunakan oleh pemerintah daerah. Rata-rata total aset pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2015 - 2020 yaitu Rp. 1.534.761.061.225,64. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera barat, ukuran pemerintah Kota Bukittinggi jika dilihat dari total aset, maka ukurannya cukup besar dengan luas wilayah yang tidak begitu luas. Sebagai contoh, Kota Pariaman dengan luas 73,36 km<sup>2</sup>, pada tahun 2019 memiliki total aset Rp 866.797.314.216,18 dan Kota Bukittinggi pada tahun 2019 memiliki total aset Rp. 1.620.883.912.558,68.

Dengan PAD yang dihasilkan serta terfasilitasinya belanja modal dan ukuran pemerintahan yang cukup besar dilihat dari total asetnya, Kota

Bukittinggi diharapkan dapat menghasilkan kinerja baik demi tercapainya tujuan pemerintah yaitu kesejahteraan rakyat. Kinerja yang dapat dilihat atau dinilai berdasarkan data yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik nantinya akan meningkatkan motivasi dan inovasi pemerintah dalam melakukan program kerja atau kegiatan investasi dengan terfasilitasinya dana untuk selanjutnya diharapkan akan meningkatkan PAD. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah ada hubungan dari PAD, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Pada Tahun 2015-2020”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dibentuk rumusan masalah untuk membahas masalah atau kejadian yang akan dijadikan topik pembahasan pada program magang ini, antara lain :

- 1.2.1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada tahun 2015-2020 di Kota Bukittinggi ?
- 1.2.2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada tahun 2015-2020 di Kota Bukittinggi ?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan pada tahun 2015-2020 di Kota Bukittinggi ?

### **1.3. Tujuan Laporan Magang**

- 1.3.1. Untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada tahun 2015-2020 di Kota Bukittinggi.
- 1.3.2. Untuk melihat bagaimana pengaruh Belanja Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada tahun 2015-2020 di Kota Bukittinggi.
- 1.3.3. Untuk melihat bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan pada tahun 2015-2020 di Kota Bukittinggi.

### **1.4. Sistematika Laporan**

Sistematika pembahasan yang terdapat pada laporan ini terdiri dari lima bab, antara lain;

**BAB I :**       Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan laporan magang, sistematika laporan dan manfaat karya ilmiah.

**BAB II :**       Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan teori tersebut akan digunakan serta mendukung penelitian ini. Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

**BAB III :**       Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan dan menjelaskan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data pada penelitian ini, melakukan uji hipotesis yang selanjutnya menjelaskan temuan dalam analisis data tersebut.

**BAB V : Penutup**

Bab penutup merupakan bagian akhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian serta kegiatan magang.

**1.5. Manfaat Karya Ilmiah**

**1.5.1. Bagi Mahasiswa**

- 1.5.1.1. Meningkatkan pengetahuan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan apa saja komponen serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya pada bagian Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah.

- 1.5.1.2. Meningkatkan keterampilan, cara berpikir dan cara bertindak pada lingkungan, yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, terutama keuangan dan akuntansi pemerintahan.

**1.5.2. Bagi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

- 1.5.2.1. Memperoleh informasi mengenai kondisi nyata di dunia kerja yang berguna bagi peningkatan kualitas lulusan Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
- 1.5.2.2. Untuk mengevaluasi kesesuaian kurikulum S1 Akuntansi dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam praktik keuangan dan akuntansi di pemerintahan.

**1.5.3. Bagi Dunia Usaha/Dunia Kerja (Badan Keuangan Kota Bukittinggi)**

- 1.5.3.1. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 1.5.3.2. Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi, dilihat dari segi sumber daya manusia yang dihasilkan lembaga pendidikan tinggi

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Keuangan Daerah**

##### **2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Unsur dari keuangan daerah yaitu meliputi :

- 1) Hak daerah, yaitu hak pemerintah daerah dalam memungut pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya serta melakukan pinjaman berdasarkan urgensi dan kepentingan pemerintah daerah.
- 2) Kewajiban Daerah, yaitu kewajiban dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Serta memenuhi kewajiban finansial seperti melunasi pinjaman dan membayar kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah.
- 3) Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, di mana kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah atau dikelola oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Dan kekayaan

pihak lain berupa kewajiban pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kepentingan masyarakat.

Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah perlu dikelola oleh sebuah sistem atau perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintah daerah lebih tertata dan jelas pertanggungjawabannya.

### **2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Untuk tercapainya tujuan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Seluruh data keuangan perlu didokumentasikan mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku. Untuk pemerintahan daerah sendiri, kebijakan yang perlu diikuti yaitu peraturan negara yang kemudian dikonversi ke kepada peraturan para masing-masing kepala daerah. Selain kebijakan atau peraturan daerah, pencatatan keuangan juga perlu mengikuti standar akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Prinsip manajemen daerah juga penting dalam rangka pengelolaan keuangan daerah agar lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan. Data keuangan yang digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Prinsip manajemen keuangan daerah antara lain yaitu :

- 1) Akuntabilitas, laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sehingga keandalan laporan keuangan

sangat penting sehingga dapat menyampaikan informasi yang dapat dipercaya kepada para penggunanya.

- 2) *Value For Money*, prinsip ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan suatu sumber daya dalam sudut pandang ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Indikator ekonomi merupakan perolehan input dengan kualitas tertentu yang didapatkan dengan harga terendah, serta meminimalkan input dari sumber daya yang digunakan. Indikator efisiensi merupakan penggunaan input yang terendah demi mencapai output tertentu. Indikator efektivitas adalah suatu tingkat pencapaian hasil program dengan target sederhana yang telah ditetapkan.
- 3) *Transparansi*, adanya keterbukaan mengenai dasar terbentuknya kebijakan keuangan daerah, terbuka mengenai kondisi keuangan pemerintahan dengan memberikan akses terbuka dalam perolehan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah.
- 4) *Pengendalian*, proses pengawasan dan monitoring terhadap operasional yang diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintah dapat tercapai, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan agar dilakukan sebagaimana seharusnya.
- 5) *Partisipatif*, adanya peran dari publik baik langsung maupun tidak langsung dalam sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pendapat, kritik, saran atau masukan yang berfungsi pada perbaikan serta perkembangan pengelolaan.

## **2.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.2.1. Pengertian kinerja keuangan**

Menurut Fahmi (2018: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu organisasi pada suatu periode tertentu baik dalam aspek pengumpulan dana atau pendapatan maupun penggunaan dana, yang hasil penilaiannya akan menunjukkan bagaimana tingkat kesehatan organisasi baik pengendalian internalnya serta keuangannya. Kinerja keuangan organisasi dapat mempengaruhi eksistensi organisasi pada industri tertentu, perencanaan strategi dan pengambilan keputusan oleh para pemegang kepentingan.

Menurut Giftovel Rondonuwu (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari pencapaian program kerja pemerintah daerah demi mendukungnya tujuan pemerintah yang dilihat dari aspek keuangan

berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

### **2.2.2. Pengukuran kinerja keuangan**

Suatu program kerja yang dilakukan berdasarkan rencana dan strategi yang sebelumnya sudah ditentukan perlu dilakukan evaluasi sebagai bentuk penilaian atas tingkat keberhasilan program kerja tersebut. Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012:72), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan program kerja, mengukur efektivitas dan efisiensi melalui realisasi anggaran pendapatan dan belanja, serta mengevaluasi kinerja keuangan periode tertentu untuk merencanakan secara maksimal kinerja keuangan periode berikutnya. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:19).

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan, yaitu analisis surplus/defisit APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan beberapa indikator lainnya. Penelitian ini menggunakan indikator rasio desentralisasi fiskal sebagai tolak ukur pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Rasio

desentralisasi fiskal digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan kebutuhan daerahnya sendiri di luar dari bantuan pemerintah pusat khususnya dalam pembangunan daerah. Pengukuran menggunakan rasio desentralisasi fiskal menurut Mahmudi (2016:140) dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} \times 100\%}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Dari rumus tersebut dapat dilihat bagaimana perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah, sehingga persentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah dapat terlihat. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan, maka pemerintah daerah dianggap mampu menyelenggarakan desentralisasi. Rasio desentralisasi fiskal dipilih sebagai indikator pengukuran kinerja dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan dengan variabel bebas lainnya. Melalui pengolahan data nantinya akan dilihat apakah benar adanya keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini.

## **2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintahan pada wilayah tertentu dari hasil wilayah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 , PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan

otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu daerah maka dapat dilihat tingkat kemandiriannya untuk memenuhi kewajiban daerah tersebut dan ketergantungan dengan pemerintahan pusat rendah. Selain itu juga tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dapat dicapai, sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana serta daerah tidak mengalami kesenjangan sosial dan fasilitas dengan kota-kota besar. Sumber pendapatannya yaitu pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tetapi, dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah mengenai pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, seperti distribusi barang dan jasa antar daerah.

### **2.3.2. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang diperoleh dari kontribusi wajib baik dari wajib pajak orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pajak

daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan beberapa pajak lainnya.

### **2.3.3. Retribusi Daerah**

Sugianto pada tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Retribusi Daerah mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah sebagai bentuk pembayaran atas pemakaian atau memperoleh pekerjaan, pelayanan dan jasa pemerintah daerah Untuk retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang pribadi atau badan, contohnya adalah lahan pada pusat perbelanjaan atau pasar yang berada pada lahan pemerintah.

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menggunakan prinsip komersial berupa pelayanan yang memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dioptimalisasi pemanfaatannya atau pelayanan dari pemerintah yang belum disediakan oleh pihak swasta. Contoh dari retribusi jasa usaha adalah retribusi tempat parkir khusus, retribusi terminal dan contoh lainnya. Dan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu

yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang ditujukan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, barang, fasilitas, sarana dan prasarana guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu contoh dari Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan.

#### **2.3.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Menurut Siregar (2015:142) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bentuk dividen, yaitu bagian yang diberikan kepada pemerintah Daerah. Di mana pendapatan laba yang diterima merupakan hasil dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta oleh pemerintah daerah dan biasanya kepada badan usaha atau perusahaan yang beroperasi pada wilayah pemerintahan daerah tersebut.

#### **2.3.5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Pendapatan jenis ini merupakan pendapatan yang tidak termasuk ke dalam kriteria pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan bunga deposito, selisih nilai tukar, pendapatan denda pajak dan denda retribusi, serta beberapa pendapatan daerah lainnya yang sah.

#### **2.4. Belanja Modal Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 71 tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Daerah adalah pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh suatu aset yang dikuasai pemerintah daerah tersebut dan diharapkan dapat memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Guna dari belanja modal ini antara lain yaitu untuk menunjang operasional pemerintahan, contohnya pembelian mesin dan teknologi.

Selain itu pembelian lahan berupa tanah, bangunan atau aset tetap lainnya juga merupakan belanja modal daerah yang bertujuan untuk menunjang fasilitas operasional pemerintah maupun fasilitas yang ditujukan untuk masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal daerah adalah pengeluaran yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah nilai aset pemerintah daerah tersebut. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur fasilitas umum yang bertujuan untuk

kesejahteraan masyarakat. Dengan terfasilitasinya masyarakat diharapkan dapat menjadi bentuk desentralisasi yang diinginkan rakyat dan juga diharapkan dapat membuat rakyat lebih peduli terhadap pembayaran pajak serta retribusi sebagai bentuk timbal balik yang berhak pemerintah terima. Saling mengerti dan mendukung merupakan Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah dengan masyarakat. Dengan masyarakat yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi menjadikan pendapatan asli daerah juga meningkat.

## **2.5. Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran merupakan suatu bilangan yang mendeskripsikan besaran atau skala suatu objek. Ukuran (*size*) Pemerintah daerah adalah seberapa besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Besarnya total aset merupakan salah satu indikator penilaian ukuran pemerintah, selain itu jumlah pegawai, total pendapatan, dan luas daerah juga merupakan indikator penilaian ukuran pemerintah. Tetapi pada penelitian, umumnya total aset dijadikan indikator utama dalam penilaian ukuran kinerja, karena sumber data yang lebih mudah didapatkan serta angka yang pasti dengan menggunakan nilai aset pada neraca yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang

memadai. Dengan terpenuhinya kebutuhan operasional dan meningkatnya pelayanan kepada publik, harapannya juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kembali lagi memfasilitasi pembangunan daerah. Ukuran pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, besarnya ukuran pemerintah daerah akan membuat kemungkinan kegiatan operasional lebih mudah terfasilitasi. Sehingga pemerintah dengan ukuran yang lebih besar memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakatnya serta tekanan yang lebih besar pula dari publik.

## **2.6. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih pada tahun 2013 dengan judul “pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015)” . Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015.

Maioyora Gita., Yusralini., dan Riska Natariasari pada tahun 2015 dengan judul pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota (studi empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera) penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *size* (ukuran) pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti ukuran pemerintah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian oleh Antari dan Ida pada tahun 2018 dengan judul pengaruh pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali) menunjukkan hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **2.7. Hipotesis Penelitian**

### **2.7.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan asli daerah merupakan bagian yang menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan pemerintah yang didanai oleh pendapatan asli daerah itu sendiri dapat memperlihatkan bagaimana kinerja keuangan mereka. Dari keterkaitan tersebut dapat dibentuk sebuah hipotesis dimana pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2015 - 2020

### **2.7.2. Pengaruh Belanja Modal Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi**

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran atau pengurangan harta yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dengan meningkatkan nilai aset yang selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomis. Selain itu juga dengan bertambahnya dan dibenahinya fasilitas umum maka tujuan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya juga dapat tercapai. Dengan adanya peningkatan nilai aset dan kemungkinan adanya manfaat ekonomis yang akan diterima, maka harapannya dapat menjadikan kinerja keuangan yang baik dan memuaskan. Sehingga hipotesis kedua yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Belanja Modal Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2015 - 2020

### **2.7.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi**

Total aset merupakan hasil dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh suatu instansi, dalam bentuk aset tetap dan aset lancar. Semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka kebutuhan instansi dapat terpenuhi. Aset tetap memiliki salah satu karakteristik yaitu akan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Dengan penggunaan dan pemanfaatan aset tetap yang maksimal diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan pemerintahan. Pendapatan yang didapat dari pemaksimalan aset daerah nantinya akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Sehingga kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio desentralisasi fiskal di mana mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Dari penjelasan tersebut maka akan diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Ukuran Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2015 – 2020.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan mengolah data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi. Penelitian ini bermaksud untuk mengamati bagaimana pengaruh antara beberapa variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **3.2 Sumber dan Data Penelitian**

Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian seperti artikel, buku, dan Undang-Undang Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah yang dapat diakses secara online. Serta data dalam bentuk angka diperoleh dari laporan keuangan daerah Kota Bukittinggi dengan mengambil angka yang dibutuhkan dalam penelitian. Data keuangan yang dibutuhkan berdasar pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kota Bukittinggi tahun 2015-2020, sesuai dengan kebutuhan data pada penelitian ini.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kausatif, di mana penelitian bertujuan untuk melihat keterkaitan antar variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut

Lararenjana di tahun 2020, *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian pribadi penulis. Teknik pengambilan sampel ini digunakan karena penelitian dilakukan berdasarkan pada tempat penulis mengikuti program magang. Data diambil dari arsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2015-2020 yang ada di bagian akuntansi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap LKPD yang diakses melalui internet. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi pustaka yang dikumpulkan sebagai referensi dan pedoman dalam menunjang kelengkapan serta keabsahan penelitian berupa pengertian menurut para ahli, peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik bahasan serupa.

Penelitian ini menguji data dari laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2020 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Total Aset, dan Total Penerimaan Daerah. Data PAD, Belanja Modal. Data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai variabel bebas pertama pada penelitian ini untuk melihat berapa pendapatan yang dihasilkan dan menjadi hak pemerintah Kota Bukittinggi. Data belanja modal sebagai variabel bebas kedua digunakan untuk melihat seberapa banyak biaya untuk memperoleh aset yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Data total aset digunakan sebagai tolak ukur dari variabel bebas ketiga yaitu ukuran pemerintah, semakin besar total aset yang dimiliki maka dapat diasumsikan ukuran pemerintahnya juga besar. Yang terakhir yaitu data total penerimaan daerah digunakan dalam perhitungan kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel terikat, dimana kinerja keuangan pemerintah pada penelitian ini

diukur menggunakan rumus desentralisasi fiskal dengan membandingkan PAD dengan total penerimaan daerah sehingga dapat dilihat persentase jumlah PAD dari total penerimaan. Berikut adalah data dari ketiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1 Data Ketiga Variabel Bebas Yang Diperlukan**

Tahun	PAD Rp	Belanja Modal Rp	Total Aset Rp
2015	66.027.359.716,34	69.174.912.576	1.443.534.285.031,71
2016	71.303.781.735,85	80.926.569.091	1.492.027.311.190,50
2017	102.375.931.332,69	115.736.552.854	1.515.282.417.304,37
2018	101.936.792.226,61	178.010.817.194	1.445.331.498.036
2019	111.896.596.611,05	187.968.455.096,79	1.620.883.912.558,68
2020	84.087.662.500,62	249.317.613.815,34	1.691.506.943.232,61

Berdasarkan data pada laporan realisasi anggaran tahun 2015 – 2020 pada bagian belanja modal pemerintah Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan, sedangkan PAD yang terkumpul mengalami kondisi fluktuatif. Untuk total aset sendiri terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2018, total aset mengalami penurunan yang kemungkinan diakibatkan oleh habisnya masa ekonomis aset, penjualan, penghapusan dan pemusnahan aset. Untuk variabel terikat yaitu kinerja keuangan pemerintah menggunakan rasio desentralisasi fiskal yang dihitung menggunakan data PAD dan total penerimaan daerah menghasilkan data sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal**

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah Rp	Total Penerimaan Daerah Rp	Rasio Desentralisasi Fiskal
2015	66.027.359.716,34	593.323.296.014,34	11,13%
2016	71.303.781.735,85	647.045.721.855,85	11,02%
2017	102.375.931.332,69	653.374.887.189,69	15,67%
2018	101.936.792.226,61	695.592.067.770,61	14,65%
2019	111.896.596.611,05	734.106.696.896,05	15,24%
2020	84.087.662.500,62	689.222.919.606,62	12,20%

Hasil dalam bentuk dari perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang dihasilkan memiliki rata-rata sebesar 13.32%, di mana rasio tersebut merupakan komposisi PAD pada total penerimaan daerah secara keseluruhan. Selain PAD penerimaan yang didapat yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta daerah, bantuan keuangan dan pendapatan hibah. Jika dilihat dari hasil perhitungan, tingkat kemandirian pemerintah Kota Bukittinggi tergolong cukup rendah karena dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah jauh lebih besar dibanding pendapatan asli daerahnya sendiri.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan koefisien determinasi dengan bantuan aplikasi SPSS versi 24. Data dari variabel bebas (PAD, belanja modal, ukuran pemerintah) melalui proses transformasi ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih, karena nilai variabel bebas pada penelitian ini dalam jumlah miliar rupiah. Dengan kata lain penggunaan logaritma natural digunakan untuk menyederhanakan data tanpa mengubah nilai sebenarnya.

#### 3.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Umi Narimawati (2008), Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval. Variabel bebas atau yang dikenal dalam perhitungan sebagai variabel X pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Kota Bukittinggi secara keseluruhan. Variabel terikat atau variabel Y dalam penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Persamaan dalam perhitungan regresi linear sederhana menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3 + \dots + e$$

Y = Variabel terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi)

$x_1$  = Variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi)

$x_2$  = Variabel bebas (Belanja Modal Daerah Kota Bukittinggi)

$x_3$  = Variabel bebas (Ukuran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi bebas (besaran respon yang ditimbulkan oleh variabel X)

$e$  = error term

### 3.4.2. Uji T

Menurut Sudijono (2010), Uji T (*Test T*) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa di antara dua buah *mean* sampel yang diambil secara *random* dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikan koefisien regresi. Koefisien regresi yang signifikan menunjukkan bagaimana pengaruh variabel bebas menjelaskan variabel terikat secara individual. Level signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan jika signifikansi lebih besar dari level signifikansi maka  $H_0$  ditolak.

### 3.4.3. Koefisien determinasi ( $r^2$ )

Koefisien determinasi atau yang dilambangkan dengan  $r^2$  adalah pengukuran yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Melalui pengukuran ini dilihat seberapa besar kemampuan variabel dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya. Hasil pengukuran  $r^2$  mendekati 0 (nol) maka tidak ada hubungan yang berarti antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan jika  $r^2$  sama dengan 1 berarti ada hubungan kuat antara variabel bebas dan variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil Perusahaan**

Undang – Undang (UU) Nomor 32 tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan hasil perubahan dari UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 memberikan dampak perubahan pada beberapa bidang, termasuk perubahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka dibentuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Bukittinggi, yang didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 mengenai Pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka pada tanggal 2 Desember 2016 pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan peraturan daerah Kota Bukittinggi no. 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, perlu ditetapkannya peraturan walikota mengenai kedudukan, susunan, tugas, dan fungsi serta tata kerja dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Lokasi dari kantor Badan Keuangan Kota

Bukittinggi beralamat di Jl. Sudirman No 27-29, Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

#### **4.1.1. Visi**

Visi adalah suatu alasan utama dari dibentuknya suatu lembaga yang berisikan sesuatu yang diharapkan dan ingin diwujudkan oleh lembaga tersebut. Visi dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu “Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundangan-undangan”.

#### **4.1.2. Misi**

Misi merupakan serangkaian upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian visi, badan keuangan memiliki beberapa misi yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemerintahan yang baik.
- 2) Mewujudkan akuntabilitas manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terstruktur dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel dan transparan.
- 5) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan aset.

Lima misi di atas merupakan langkah utama dari badan keuangan Kota Bukittinggi untuk mencapai visi yang telah disesuaikan dengan fungsi serta

tugas pokok dari badan keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Kota Bukittinggi. Harapannya dengan menjalankan misi yang telah ditetapkan, badan keuangan dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenang sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan perundang-undangan sesuai dengan visi yang ditetapkan.

#### **4.1.3. Tujuan**

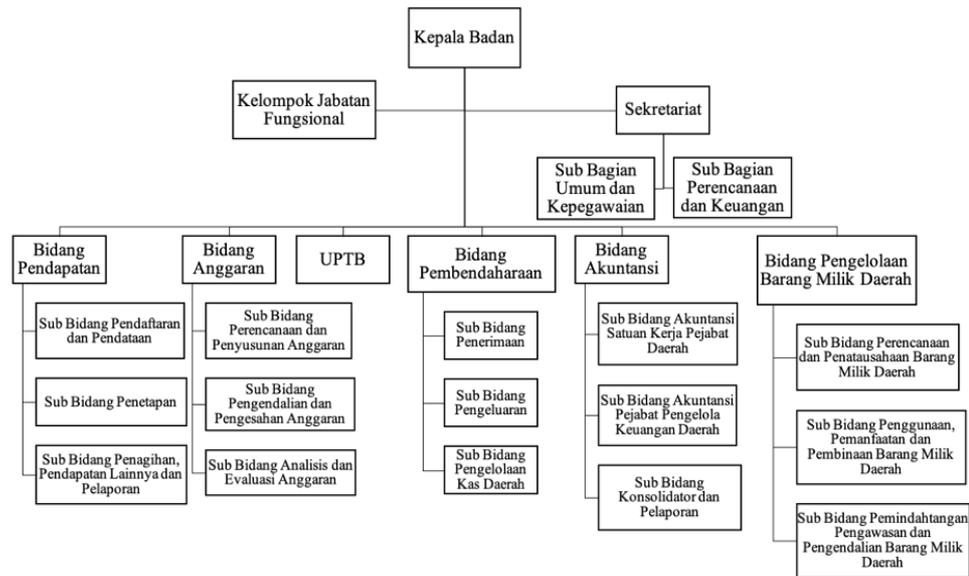
Tujuan merupakan pernyataan mengenai sebuah keadaan di masa depan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga sebagai upaya bersama untuk mencapai keadaan tersebut. Keadaan yang dimaksud ialah keadaan yang digambarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkannya, badan keuangan Kota Bukittinggi menetapkan 5 tujuan yang diharapkan akan tercapai dalam 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
- 2) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan yang baik.
- 3) Meningkatkan pendapatan keuangan daerah yang sinergis dan realistis.
- 4) Terciptanya tata pengelolaan keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel.
- 5) Terdapatnya potensi kekayaan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan daerah.

Tujuan yang pertama merupakan tujuan umum mengenai pengelolaan badan keuangan Kota Bukittinggi. Tujuan lainnya merupakan gambaran mengenai fungsi dan target mengenai kinerja pengelolaan badan keuangan Kota Bukittinggi sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **4.1.4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan suatu media yang secara formal mendefinisikan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan sesuai dengan posisi atau jabatan yang ada. Sehingga setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas operasional kerja agar setiap posisi memiliki fokus tertentu yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Pemisahan tugas juga bertujuan agar setiap pekerjaan jelas siapa yang mengerjakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu struktur organisasi menjadi suatu penetapan mengenai batasan tugas, tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing pegawai. Berikut adalah struktur organisasi badan keuangan Kota Bukittinggi :



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi**

Setiap tugas yang dilakukan oleh para pegawai haruslah didasari oleh kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan maupun program. Kegunaan dari dibentuknya suatu kebijakan yaitu agar operasional instansi dapat berjalan sesuai dengan jalur menuju tercapainya tujuan serta visi dan misi instansi tersebut. Kebijakan perlu untuk dievaluasi dan diperbaharui agar tetap relevan dengan kondisi yang terus berkembang.

## 4.2. Aktivitas Magang

### 4.2.1. Deskripsi Kegiatan Magang

Pada saat program magang berlangsung, tugas yang dilakukan oleh penulis yaitu tugas-tugas yang biasanya diberikan kepada mahasiswa yang magang di bidang PBMD. Mahasiswa magang PBMD memiliki tugas rutin yaitu rekapitulasi surat masuk dan keluar serta menerima

pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh dinas lain untuk kepentingan pembayaran pajak. Tugas tersebut dilakukan ketika ada surat masuk dan ada dinas lain yang akan meminjam BPKB, kurang lebih 3 sampai 4 hari dalam seminggu. Dari tugas rutin tersebut, penulis mendapatkan pengalaman untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan sehingga harus inisiatif ketika tugas tersebut tiba. Selain itu, pada tugas menerima pengambilan BPKB juga dibutuhkan *critical thinking* jika ada nomor kendaraan yang diminta oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain berbeda dengan yang ada di kumpulan BPKB. Biasanya hal tersebut terjadi kepada kendaraan yang telah mengganti plat kendaraannya, solusi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menyamakan nomor mesin yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan yang ada di BPKB.

Tugas lainnya yang diberikan yaitu merapikan draft surat, file dan lain sebagainya sesuai dengan koreksi atau arahan dari pegawai PBMD. PBMD memiliki sistem informasi sendiri yang digunakan untuk memperoleh laporan keuangan di bagian aset pada neraca yang biasa disebut Simda BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah). Bidang PBMD bukanlah pihak yang menginput data aset dari seluruh SKPD, melainkan mereka hanya melihat hasil dari data yang di *entry* oleh SKPD lain dan mengawasi serta mengevaluasi jika ada perbedaan data antara yang di input ke sistem dengan yang di input ke excel. Kegiatan tersebut dinamakan penatausahaan aset yang dilakukan oleh sub bagian perencanaan dan penatausahaan BMD.

Dalam kegiatan tersebut, penulis memberikan kontribusi dalam penyamaan data antara Simda BMD dengan data excel dari masing-masing pengurus barang SKPD. Pengalaman yang didapatkan yaitu beberapa pengurus barang SKPD masih kesulitan pada alur kerja penatausahaan sehingga banyak yang bertanya dan datang langsung ke PBMD untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal tersebut menyebabkan pegawai bagian penatausahaan PBMD bekerja lebih untuk mengajari serta melayani pengurus barang yang kebingungan. Beberapa pengurus barang SKPD yang telat dalam melakukan *entry* data juga menjadi salah satu kendala dalam kegiatan penatausahaan, dimana masih ada yang mendahului kepentingan pribadi padahal data penatausahaan setiap 3 bulan perlu diperbaharui untuk keperluan inventarisasi dan rekonsiliasi.

Kegiatan lain di luar membantu menyamakan data dan merapikan draft untuk bagian penatausahaan, penulis juga membantu hal yang sama ke bagian Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD. Dokumen yang biasanya perlu disamakan yaitu dokumen yang diberikan oleh SKPD lain kepada PBMD yang berisikan permohonan pemusnahan aset. Setelah aset yang diajukan untuk pemusnahan di cek langsung ke lapangan oleh pegawai, jika sesuai dengan kriteria pemusnahan maka data yang ada di laporan keuangan mengenai aset tersebut akan dikeluarkan. Penulis diberi tugas untuk menyamakan angka pada dokumen yang dikirimkan ke PBMD dengan data yang dimiliki PBMD setelah aset yang akan dimusnahkan tersebut dikeluarkan. Dilihat apakah sisa aset yang

dimiliki oleh SKPD tersebut sesuai dengan angka yang ada pada dokumen yang diberikan.

Selain pemusnahan, penjualan aset juga merupakan tanggung jawab bagian Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD. Penyamaan data yang dilakukan oleh penulis kurang lebih sama, tetapi ada pendapatan masuk yang dihasilkan dari penjualan tersebut sehingga bagian ini perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan pada saat terjadinya transaksi seperti surat kesepakatan yang ditandatangani menggunakan materai, bukti penjualan, dan kwitansi 4 rangkap. Pada bagian Penggunaan, Pemanfaatan dan Pembinaan BMD, penulis juga membantu memeriksa kelengkapan dokumen mengenai pengadaan aset oleh seluruh SKPD di Pemerintah Kota Bukittinggi. Kegiatan yang dilakukan yaitu melihat apakah seluruh kuitansi dari pengadaan aset telah dikumpulkan ke PBMD. kegiatan lainnya yaitu ikut serta pada saat turun ke lapangan dengan tugas penyebaran lembar tagihan retribusi kepada para pemilik toko yang dibangun di atas tanah milik pemerintah.

Dari seluruh tugas yang diberikan, penulis diberi tanggung jawab penuh hanya pada kegiatan rekapitulasi surat masuk dan pengambilan BPKB. Setelah dicari tahu, memang hanya tugas tersebut yang magang biasa lakukan. Untuk tugas yang bertanggung jawab atas pengolahan data atau input data ke sistem jarang dilakukan, karena memang bidang PBMD tidak bertugas melakukan *entry* data. Kegiatan lain yang dilakukan selama magang yaitu mengumpulkan data untuk keperluan penelitian. Data yang digunakan oleh penulis adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) yang telah diaudit pada bagian neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data tersebut didapatkan dari arsip yang disimpan oleh bidang akuntansi setelah meminta izin ke pegawai bidang akuntansi. LKPD yang digunakan yaitu LKPD tahun 2015 sampai 2020, data yang diperlukan yaitu data pendapatan asli daerah, belanja modal dan surplus/defisit pada LRA serta total aset pada neraca.

Kegiatan magang yang berakhir pada tanggal 20 Desember 2021 ini telah banyak memberikan pengalaman serta pembelajaran kepada penulis, serta pandangan mengenai bagaimana dunia kerja khususnya pada instansi pemerintahan daerah. Para pegawai badan keuangan telah banyak membantu dan mengayomi penulis dalam melaksanakan tugas magang serta memberi pandangan serta saran mengenai penelitian yang dilakukan penulis. Rincian kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis selanjutnya akan dijelaskan secara rinci pada tabel aktivitas. Tabel aktivitas tersebut menjelaskan kegiatan yang dilakukan setiap hari kerja oleh penulis dengan pemaparan waktu pelaksanaan kegiatan, kegiatan magang, penjelasan kegiatan magang dan pencapaian tugas. Berikut adalah tabel mengenai rincian aktivitas magang :

**Tabel 4.1 Rincian Aktivitas Magang**

<b>Har i ke-</b>	<b>Tangga l</b>	<b>Jenis Magang</b>	<b>Aktivitas Tugas Yang Diberikan</b>	<b>Pencapaian Tugas</b>

1	20 Septem ber 2021	Perkenalan dan arahan kegiatan magang.	Pengenalan instansi secara keseluruhan, penempatan divisi magang, dan penjelasan peraturan magang.	Mendapatkan informasi mengenai instansi secara umum dan peraturan yang harus dijalankan selama melaksanakan magang.  Ditempatkan pada bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
		Pencatatan surat edaran.	Membantu dalam pencatatan surat edaran sesuai format dan koreksi yang telah diberikan.	Mencatat surat edaran sesuai dengan yang seharusnya.

2	21 Septem ber 2021	Pemeriksaan kelengkapan data.	Melihat apakah ada perbedaan data (angka) pada file pengadaan barang milik daerah pemerintahan Kota Bukittinggi antara data pengadaan dengan data mutasi.	Belajar untuk kerja cermat dan teliti.
3	22 Septem ber 2021	Melanjutkan pemeriksaan kelengkapan data.	Melihat apakah ada perbedaan data (angka) pada file pengadaan barang milik daerah pemerintahan Kota	Belajar untuk kerja cermat dan teliti.

			Bukittinggi antara data pengadaan dengan data mutasi.	
		Pencocokan data yang telah diperiksa dengan data di Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).	Melakukan penyamaan data yang telah diperiksa sebelumnya dengan data yang tercatat pada SIMDA. Selanjutnya jika data sama dilakukan print out sebagai arsip.	Belajar untuk kerja cermat dan teliti.
4	23 Septem ber 2021	Pemeriksaan kelengkapan data (Dinas Kesehatan).	Mengecek kelengkapan kuitansi, faktur penjualan, Surat Pertanggungjaw	Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan melakukan

			aban (SPJ), dan berita acara penyerahan dengan daftar barang untuk penetapan status penggunaan barang milik daerah (BMD).	kerja secara rapi, cepat dan benar.
5	24 Septem ber 2021	Pemeriksaan kelengkapan data. (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BAPELITBAN G, Dinas Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup,	Mengecek kelengkapan kuitansi, faktur penjualan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan berita acara penyerahan dengan daftar barang untuk penetapan status penggunaan barang milik daerah (BMD).	Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan melakukan kerja secara rapi, cepat dan benar.

		Kesbangpol, SATPOL PP).		
		Mengikuti kegiatan pegawai.	Ikut serta dalam penyerahan aset hibah berupa <i>thermogun</i> ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Melihat bagaimana interaksi dan komunikasi yang terjadi pada acara formal.
6	27 Septem ber 2021	Izin tidak masuk.		
7	28 Septem ber 2021	Pemeriksaan kelengkapan data. (Badan Keuangan, Inspektorat, Parpora, Dikbud, Dishub, Diskominfo, DKUKMdP,	Mengecek kelengkapan kuitansi, faktur penjualan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan berita acara penyerahan dengan daftar	Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan melakukan kerja secara rapi, cepat dan benar.

		Dinas Pertanian, BPBD, Discapil).	barang untuk penetapan status penggunaan barang milik daerah (BMD).	
8	29 Septem ber 2021	Penyamaan Data asset pada neraca.	Melakukan penyamaan saldo pada neraca tahun 2020 pada Laporan Keuangan tahun 2020 dengan saldo awal Laporan Keuangan tahun 2021.	Mengetahui bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi belum tentu akurat, karena masih banyak perbedaan angka antara akhir tahun dan awal tahun berikutnya.
9	30 Septem ber 2021	Pemeriksaan kelengkapan data. (Dinas PUPR, Dinas	Mengecek kelengkapan kuitansi, faktur penjualan, Surat	Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan

		Perumahan dan Kawasan Permukiman,	Pertanggungjawaban (SPJ), dan berita acara penyerahan dengan daftar barang untuk penetapan status penggunaan barang milik daerah (BMD).	melakukan kerja secara rapi, cepat dan benar.
10	1 Oktober 2021	Izin tidak masuk.		
11	4 Oktober 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia

			setelah dikembalikan.	pada bagian aset.
12	5 Oktober 2021	Merapikan draft surat.	Merapikan draft surat tugas para pegawai untuk melaksanakan tugas dinas.	Melaksanakan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab anak magang.
13	6 Oktober 2021	Konsultasi dengan salah satu pegawai yang menjadi pembimbing dalam penulisan laporan penelitian.	Diskusi mengenai program magang yang dijalani mulai dari tujuan magang, pedoman magang, hingga menentukan topik penelitian dan target penyelesaian laporan.	Mendapat arahan dan pandangan mengenai penelitian apa saja yang dapat dilakukan.

14	7 Oktober 2021	Merapikan draft RKBMD perubahan tahun 2021.	Menyesuaikan data RKBMD sesuai dengan format yang telah ditentukan.	Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan melakukan kerja secara rapi, cepat dan benar.
15	8 Oktober 2021	Mencetak dan mengarsip RKBMD perubahan tahun 2021.	Menyesuaikan data RKBMD sesuai dengan format yang telah ditentukan.	Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan melakukan kerja secara rapi, cepat dan benar.
16	11 Oktober 2021	Merapikan draft RKBMD awal tahun 2022.	Menyesuaikan data RKBMD sesuai dengan format yang telah ditentukan.	Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan melakukan kerja secara

				rapi, cepat dan benar.
17	12 Oktober 2021	Mencetak dan mengarsip RKBMD awal tahun 2022.	Menyesuaikan data RKBMD sesuai dengan format yang telah ditentukan.	Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dan melakukan kerja secara rapi, cepat dan benar.
18	13 Oktober 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat setelah dikembalikan.	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia pada bagian aset.

19	14 Oktober 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat setelah dikembalikan.	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia pada bagian aset.
20	15 Oktober 2021	Penyamaan data dan merapikan draft.	Menyamakan data rincian penyusutan aset lainnya yang akan dihapuskan atau dimusnahkan.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.

21	18 Oktober 2021	Rekapitulasi surat masuk.	Melakukan rekap surat masuk dan keluar untuk selanjutnya diserahkan ke kepala bidang untuk diteliti kembali.	Melaksanakan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab anak magang.
22	19 Oktober 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat setelah dikembalikan.	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia pada bagian aset.

23	20 Oktober 2021	Input data penetapan status penggunaan BMD.	Setelah selesai di cek ulang, data penetapan status penggunaan BMD di input ke excel dengan format dan urutan yang benar sesuai yang tercatat di SIMDA.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.
24	21 Oktober 2021	Melanjutkan Input data penetapan status penggunaan BMD.	Setelah selesai di cek ulang, data penetapan status penggunaan BMD di input ke excel dengan format dan urutan yang benar sesuai	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.

			yang tercatat di SIMDA.	
25	22 Oktober 2021	Rekapitulasi surat masuk.	Melakukan rekap surat masuk dan keluar untuk selanjutnya diserahkan ke kepala bidang untuk diteliti kembali.	Melaksanakan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab anak magang.
26	25 Oktober 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat setelah dikembalikan.	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia pada bagian aset.

27	26 Oktober 2021	Penyamaan data aset yang akan dimusnahkan.	Menandai data barang / aset yang diajukan oleh SKPD lain untuk dimusnahkan atau dihapuskan. Serta mencocokkan kesamaan data dan total nominal barang.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.
28	27 Oktober 2021	Koreksi penulisan surat keputusan.	Memperbaiki surat keputusan penjualan BMD yang telah dikoreksi sebelumnya oleh bagian hukum.	pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah koreksi dibutuhkan segera.

29	28 Oktober 2021	Penyamaan data dan merapikan draft.	Menyamakan data rincian penyusutan aset lainnya yang akan dihapuskan atau dimusnahkan.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.
30	29 Oktober 2021	Izin tidak masuk.		
31	1 November 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia

			setelah dikembalikan.	pada bagian aset.
32	2 Novemb er 2021	Koreksi penulisan surat keputusan.	Memperbaiki surat keputusan penjualan BMD yang telah dikoreksi sebelumnya oleh bagian hukum.	dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah koreksi dibutuhkan segera.
33	3 Novemb er 2021	Penyamaan data dan merapikan draft.	Menyamakan data rincian penyusutan aset lainnya yang akan dihapuskan atau dimusnahkan.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.

34	4 Novemb er 2021	Rekapitulasi surat masuk.	Melakukan rekap surat masuk dan keluar untuk selanjutnya diserahkan ke kepala bidang untuk diteliti kembali.	Melaksanakan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab anak magang.
35	5 Novemb er 2021	Izin tidak masuk.		
36	8 Novemb er 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat setelah dikembalikan.	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia

				pada bagian aset.
37	9 Novemb er 2021	Membantu pelaksanaan kerja lapangan.	Menyebarkan undangan kepada seluruh SKPD di Kota Bukittinggi untuk menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh bidang PBMD	Sukarela membantu pekerjaan orang lain.
38	10 Novemb er 2021	Membantu penyelenggaraan acara.	Membantu penyelenggaraa n acara sosialisasi mengenai penghapusan, pemusnahan dan penjualan aset daerah (dokumentasi	Bersikap sopan, telaten dan cekatan dalam membantu berlangsungnya acara.

			kegiatan, menerima tamu)	
39	11 Novemb er 2021	Membantu pelaksanaan kerja lapangan.	Ikut serta dalam penyebaran tagihan retribusi ke pemilik toko yang dibangun di atas tanah milik pemerintah.	Mendapatkan pengalaman dalam berinteraksi kepada masyarakat dari berbagai latar belakang.
40	12 Novemb er 2021	Rekapitulasi surat masuk.	Melakukan rekap surat masuk dan keluar untuk selanjutnya diserahkan ke kepala bidang untuk diteliti kembali.	Melaksanakan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab anak magang.
41	15 Novemb er 2021	Merapikan dokumen	Merapikan draft Standar Satuan Harga sesuai	Melakukan pekerjaan dengan hati-

		Standar Satuan Harga.	dengan klasifikasi barang.	hati dan teliti serta cepat karena data setelah disesuaikan dengan format dibutuhkan segera.
42	16 November 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat setelah dikembalikan.	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia pada bagian aset.
43	17 November 2021	Merapikan dokumen	Merapikan draft Standar Satuan Harga sesuai	Melakukan pekerjaan dengan hati-

		Standar Satuan Harga.	dengan klasifikasi barang.	hati dan teliti serta cepat karena data setelah disesuaikan dengan format dibutuhkan segera.
44	18 November 2021	Penyamaan data dan merapikan draft.	Menandai data barang / aset yang diajukan oleh SKPD lain untuk dimusnahkan atau dihapuskan. Serta mencocokkan kesamaan data dan total nominal barang.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.

45	19 Novemb er 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat setelah dikembalikan.	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia pada bagian aset.
46	22 Novemb er 2021	Penyamaan data dan merapikan draft.	Menyamakan data rincian penyusutan aset lainnya yang akan dihapuskan atau dimusnahkan.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.

47	23 November 2021	Mengambil data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian.	Mencari data yang diperlukan mengenai penelitian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015-2020.	Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian (PAD, belanja daerah, total aset).
48	24 November 2021	Memperbaiki surat edaran .	Memperbaiki surat edaran setelah dikoreksi oleh bagian hukum.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah koreksi dibutuhkan segera.
49	25 November 2021	Izin tidak masuk.		

50	26 Novemb er 2021	Rekapitulasi surat masuk.	Melakukan rekap surat masuk dan keluar untuk selanjutnya diserahkan ke kepala bidang untuk diteliti kembali.	Melaksanakan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab anak magang.
51	29 Novemb er 2021	Mencari selisih antar 2 data.	Menyamakan 2 file mengenai aset Dinas Kesehatan dan mencari perbedaan angka serta barang antara file yang telah diinput ke sistem dengan yang dikumpulkan	Melakukan pekerjaan dengan hati- hati dan teliti serta cepat karena data setelah koreksi dibutuhkan segera.

			kepada bidang PBMD.	
52	30 Novemb er 2021	Mencari selisih antara 2 data.	Melanjutkan menyamakan 2 file mengenai aset Dinas Kesehatan dan mencari perbedaan angka serta barang antara file yang telah diinput ke sistem dengan yang dikumpulkan kepada bidang PBMD.	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah koreksi dibutuhkan segera.
53	1 Desemb er 2021	Mengambil data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian.	Mencari data yang diperlukan mengenai penelitian dari Laporan	Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan

			Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015- 2020.	penelitian (PAD, belanja daerah, total aset).
54	2 Desemb er 2021	Mengikuti diskusi dengan tamu dari Bengkulu Utara.	Melihat bagaimana para pegawai bagian PBMD Bukittinggi dan PBMD Bengkulu Utara saling bertukar pikiran mengenai beberapa permasalahan dan program kerja bidang PBMD dari masing-masing daerah.	Melihat secara langsung bagaimana cara komunikasi yang baik dan profesional dalam pertemuan formal.

55	3 Desemb er 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat setelah dikembalikan.	Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan yang tersedia pada bagian aset.
56	6 Desemb er 2021	Mengambil data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian.	Mencari data yang diperlukan mengenai penelitian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015-2020.	Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian (PAD, belanja daerah, total aset).

57	7 Desember 2021	Pembuatan kuitansi penjualan BMD.	Membuat kuitansi penjualan barang sisa dari pembangunan sekolah yang dijual kepada pihak lain berupa sisa bongkaran (seng)	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.
58	8 Desember 2021	Koreksi penulisan surat keputusan.	Memperbaiki surat keputusan penjualan BMD yang telah dikoreksi sebelumnya oleh bagian hukum.	dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah koreksi dibutuhkan segera.
59	9 Desember 2021	Arsip kwitansi, Surat Pertanggungjawaban, serta bukti	Memisahkan dokumen asli dengan dokumen yang	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati, teliti serta

		transaksi. (membantu tugas bendahara badan keuangan)	telah di fotokopi. Dari kwitansi, Surat Pertanggungjawaban, serta bukti transaksi sesuai dengan ketentuan menjadi 3 rangkap.	cepat karena data perlu diarsip jumlahnya banyak dari semua transaksi harian badan keuangan.
60	10 Desember 2021	Arsip kwitansi, Surat Pertanggungjawaban, serta bukti transaksi. (membantu tugas bendahara badan keuangan)	Memisahkan dokumen asli dengan dokumen yang telah di fotokopi. Dari kwitansi, Surat Pertanggungjawaban, serta bukti transaksi sesuai dengan ketentuan	Melakukan pekerjaan dengan hati-hati, teliti serta cepat karena data perlu diarsip jumlahnya banyak dari semua transaksi harian badan keuangan.

			menjadi 3 rangkap.	
61	13 Desember 2021	Rekapitulasi surat masuk.	Melakukan rekap surat masuk dan keluar untuk selanjutnya diserahkan ke kepala bidang untuk diteliti kembali.	Melaksanakan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab anak magang.
62	14 Desember 2021	Koreksi penulisan surat keputusan.	Memperbaiki surat keputusan penjualan BMD yang telah dikoreksi sebelumnya oleh bagian hukum.	dengan hati-hati dan teliti serta cepat karena data setelah koreksi dibutuhkan segera.
63	15 Desember 2021	Penyamaan data aset yang akan dimusnahkan.	Menandai data barang / aset yang diajukan	Melakukan pekerjaan dengan hati-

			<p>oleh SKPD lain untuk dimusnahkan atau dihapuskan. Serta mencocokkan kesamaan data dan total nominal barang.</p>	<p>hati dan teliti serta cepat karena data setelah penyamaan dibutuhkan segera.</p>
64	16 Desember 2021	Membantu penyelenggaraan acara.	<p>Bidang PBMD melangsungkan acara rapat bersama kepala sekretariat daerah, kepala badan keuangan, kepala dinas PUPR, kepala dinas koperasi, perwakilan bagian hukum</p>	<p>Melihat secara langsung bagaimana cara berkomunikasi, penyampaian pendapat yang baik, dan fokus terhadap pembahasan. Pengamatan tersebut dilakukan pada saat rapat</p>

			<p>dan tamu lainnya untuk membahas mengenai permasalahan pengakuan tanah pemerintah yang dianggap sebagai tanah waris oleh masyarakat di daerah pasar atas Bukittinggi.</p>	<p>berlangsung mulai dari pemaparan permasalahan, diskusi, debat, hingga pengambilan keputusan oleh para peserta rapat.</p>
65	17 Desember 2021	Melayani dinas yang ingin meminjam BPKB.	<p>Mencatat informasi yang dibutuhkan ketika ada yang meminjam BPKB, mencari BPKB, dan menyimpannya kembali sesaat</p>	<p>Bertanggung jawab atas apa yang diamanahi dan berpikir kritis saat ada perbedaan informasi dari yang diminta oleh SKPD dan</p>

			setelah dikembalikan.	yang tersedia pada bagian aset.
66	20 Desember 2021	Rekapitulasi surat masuk.	Melakukan rekap surat masuk dan keluar untuk selanjutnya diserahkan ke kepala bidang untuk diteliti kembali.	Melaksanakan tugas rutin yang menjadi tanggung jawab anak magang.

#### 4.2.2. Permasalahan Saat Pelaksanaan Magang

Di setiap kehidupan pasti ada momen dimana sesuatu kurang berjalan lancar atau bahkan tidak sesuai dengan harapan. Pada situasi bekerja juga pasti mengalami kesulitan atau tantangan yang harus dilewati untuk mencapai hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Dari hasil observasi penulis pada saat melaksanakan program magang di bidang PBMD, kesulitan dan tantangan yang banyak ditemukan yaitu beberapa pegawai dari SKPD lain yang ditugaskan sebagai pengurus barang belum memahami bagaimana sistematis penatausahaan aset. Kebanyakan merasa kesulitan jika harus berurusan dengan sistem, yang kemungkinan

diakibatkan oleh adanya permasalahan pada sistem dan proses input data yang masih membingungkan. Hal tersebut menyebabkan para pegawai PBMD bagian penatausahaan aset harus bekerja ekstra untuk mengajari Kembali serta menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para pengurus barang.

Selain permasalahan mengenai penatausahaan aset, profesionalisme para pegawai juga merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan adanya permasalahan. Dari apa yang penulis amati, banyak permasalahan pribadi yang mempengaruhi kinerja pegawai dan menjadikan mereka kewalahan ketika sudah mendekati waktu tenggat. Hal tersebut mungkin tidak dapat dijadikan topik pembahasan pada laporan ini, tetapi penulis merasa sangat disayangkan hal tersebut terjadi karena kinerja para pegawai dapat lebih baik jika mereka lebih profesional sehingga tanggung jawab yang mereka lakukan serta hasil pekerjaan akan lebih maksimal. Untuk permasalahan yang dialami oleh penulis sendiri yaitu program magang yang dijalani kurang memberikan kesan dalam hal penerapan teori yang telah diberikan dibangku perkuliahan. Penulis merasa tugas yang diberikan tidak sesuai dengan bidang studi yang dijalani oleh penulis.

Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan rutinitas atau tugas yang diberikan kepada pemegang hanya sebatas mendukung pekerjaan pegawai dengan memberikan sumbangsih tenaga dan waktu, tidak terlalu memfokuskan kepada wawasan atau ilmu yang dimiliki oleh pemegang. Walaupun begitu penulis telah menjelaskan kepentingan program magang ini untuk menyelesaikan tugas akhir, sehingga

supervisor dan beberapa pegawai membantu penulis dalam menentukan topik penelitian yang sekiranya relevan dengan kondisi pemerintahan di Bukittinggi. Mereka juga terbuka jika penulis memiliki beberapa pertanyaan seputar penelitian dan meminta pendapat serta saran.

#### **4.2.3. Deskripsi Permasalahan yang Menjadi Topik Penelitian**

Kota Bukittinggi merupakan salah satu Kota besar di Provinsi Sumatera Barat, walaupun luasan wilayahnya tidak besar. Kota Bukittinggi pernah menjadi ibu kota negara Indonesia pada tahun 1948 sehingga banyak peninggalan bersejarah pada kota ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bukittinggi merupakan kota wisata di mana pendapatan asli daerahnya mengandalkan pajak hotel, restoran dan retribusi. Dalam hal pembangunan, Kota Bukittinggi termasuk salah satu kota di Sumatera Barat yang mengalami perubahan infrastruktur yang cukup baik, karena merupakan pusat wisata Sumatera Barat. Untuk menunjang kegiatan serta menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat dan wisatawan yang datang, pemerintah Bukittinggi banyak memperhatikan fasilitas-fasilitas publik dan fasilitas perkantoran untuk dinas yang mereka miliki.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari belanja modal pemerintah Kota Bukittinggi dan belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang diharapkan kedepannya dapat memberikan keuntungan ekonomis. Keuntungan ekonomis yang dimaksud akan diakui sebagai pendapatan asli daerah, di mana pendapatan ini merupakan komponen

utama yang akan digunakan jika ada kegiatan investasi untuk wilayah pemerintah kota tersebut. Selain pendapatan asli daerah yang mendapatkan pengaruh dari adanya belanja modal, ukuran pemerintah juga mendapatkan pengaruhnya. Ukuran pemerintah dalam penelitian ini dilihat dari jumlah aset yang dimiliki, belanja modal yang terjadi menyebabkan nilai aset tetap meningkat. Pengeluaran untuk pengadaan barang penunjang operasional pemerintahan juga termasuk kepada belanja modal pemerintah, pengeluaran ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga operasional berjalan sesuai harapan dan akan ada inovasi-inovasi baru dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari total aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bukittinggi, jumlahnya terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan aset tetap setiap tahunnya dari tahun 2015 – 2020 yaitu Rp. 54.562.235.654,09. Pada tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan dan aset tetap yang sering mengalami peningkatan yaitu tanah serta gedung dan bangunan. Beberapa tahun terakhir memang banyak dilakukan renovasi serta pembangunan kantor dari beberapa dinas di Kota Bukittinggi. Hal tersebut disebabkan oleh banyak kantor dinas di Kota Bukittinggi yang merupakan bangunan tua dan berukuran kecil sehingga kurang memadai untuk dijadikan sebuah kantor. Beberapa tahun terakhir kurang lebih ada 2 kantor dinas dan 1 fasilitas pelayanan publik yang dibangun dengan ukuran serta biaya besar. Selain untuk biaya pembangunan gedung dan bangunan, biaya pendukung bangunan tersebut juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Beberapa proyek pembangunan fasilitas publik lainnya yang selesai dibangun beberapa tahun lalu saat ini jika dilihat kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya yaitu pembangunan Gedung parkir di pusat kota dengan tujuan untuk menanggulangi kemacetan akibat banyaknya lahan di jalan yang digunakan untuk parkir. Akan tetapi, saat ini Gedung tersebut hampir tidak pernah digunakan oleh masyarakat publik dan bahkan dijadikan tempat tinggal untuk para tunawisma di daerah tersebut tanpa seizin pihak berwajib. Gedung tersebut hanya akan terisi jika pada musim libur lebaran dan tahun baru, karena pada saat tersebutlah melonjaknya tingkat wisatawan. Tetapi sangat disayangkan bahwa pada saat liburan juga masih banyak wisatawan yang memilih area jalan untuk memarkirkan kendaraan mereka, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh jarak Gedung parkir yang kurang strategis dari pusat wisata yaitu Jam Gadang, area perbelanjaan pasar atas dan kebun binatang. Selain akibat letak, kebijakan atau aturan yang mengharuskan para wisatawan untuk parkir di Gedung parkir serta peraturan kepada para tukang parkir pinggir jalan juga kurang ketat.

Dari contoh proyek Gedung parkir tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran dalam bentuk belanja modal yang diharapkan akan menimbulkan pendapatan di kemudian hari dan digunakan secara maksimal oleh masyarakat tapi belum berjalan sesuai ekspektasi. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dari apa yang penulis amati kebanyakan masyarakat enggan untuk parkir di Gedung tersebut. Kondisi tersebut

seharusnya menjadi evaluasi oleh pemerintah Kota Bukittinggi dan menyusun strategi selanjutnya agar kegunaan aset tersebut lebih maksimal sehingga manfaat ekonomis yang diharapkan dari dibangunnya aset tersebut juga maksimal. Jika ke depannya ada proyek pembangunan infrastruktur atau pembelian aset tetapi harapan dari pembelian aset tersebut tidak tercapai, maka akan sangat rugi telah mengeluarkan biaya besar tanpa ada timbal balik yang sepadan. Pemerintahan daerah memang bukan suatu organisasi yang berorientasi profit, tetapi dengan adanya pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini agar dapat melihat apakah kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh jumlah PAD yang dihasilkan, jumlah belanja modal yang dikeluarkan dan ukuran pemerintah yang dalam penelitian ini menggunakan total aset sebagai tolak ukurnya. Dengan kemandirian tersebut harapannya pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya sehingga bantuan dana dari pusat berkurang, hal tersebut dapat membantu daerah lainnya yang mengalami kesulitan dari sisi keuangan yang dikarenakan sangat sedikit potensi daerah yang dapat dihasilkan. Dengan begitu pembangunan di Indonesia dapat lebih merata dan tidak ada kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat.

### **4.3. Hasil Analisis Data**

#### **4.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis regresi linear berganda, di mana Teknik analisis ini digunakan untuk melihat adakah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil olah data menggunakan Teknik ini memperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized	Sig.	Kesimpulan
		Coefficients		
		B		
1	(Constant)	-202,724	,374	
	PAD (X1)	11,262	,024	$H_1$ diterima
	Belanja Modal (X2)	-1,072	,412	$H_2$ tidak diterima
	Ukuran Pemerintah (X3)	-1,436	,843	$H_3$ tidak diterima

*Sumber : Hasil olah data sekunder, 2021*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dari hasil pengolahan data tersebut didapatkan persamaan regresi linear berganda yaitu :

$$Y = -202.724 + 11.262x_1 - 1.072x_2 - 1.436x_3$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah

$x_1$  : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$x_2$  : Belanja Modal

$x_3$  : Ukuran Pemerintah

Nilai konstanta yang dihasilkan pada persamaan regresi tersebut bernilai negatif, tetapi bukan berarti tidak ada pengaruh yang terjadi pada penelitian. Konstanta merupakan angka yang harus muncul agar nilai dari variabel  $x$  dapat dihitung. Jika koefisien dari variabel  $x_1$ ,  $x_2$ , dan  $x_3$  diasumsikan adalah nol (0), di mana tidak ada PAD yang dihasilkan, tidak ada belanja modal yang terjadi dan tidak aset yang dimiliki maka barulah kinerja keuangan pemerintah bernilai negatif yaitu sebesar -202.724.

Nilai dari koefisien regresi variabel PAD menunjukkan hasil positif sebesar 11.262 sehingga dapat dikatakan apabila variabel PAD meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel terikat atau kinerja keuangan pemerintah akan meningkat sebesar 11.262. Nilai koefisien regresi dari variabel belanja modal menunjukkan hasil negatif sebesar -1.072 yang berarti jika variabel belanja modal mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel dependen atau kinerja keuangan pemerintah akan berkurang sebesar 1.072.

Nilai koefisien regresi variabel ketiga yaitu ukuran pemerintah menghasilkan nilai negatif sebesar - 1.436 yang memiliki arti bahwa ketika variabel ukuran pemerintah di mana dalam penelitian ini merupakan total aset yang dimiliki pemerintah Kota Bukittinggi mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi juga akan mengalami penurunan sebesar 1.436.

#### 4.3.2. Uji-t

Uji t atau uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang sebelumnya dibuat oleh penulis sesuai atau tidak dengan hasil pengolahan data. Hasil dari uji-t tertera pada Tabel 4.3 di atas. Metode analisis data menggunakan uji t ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari PAD, belanja modal dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah dengan level signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil T hitung dengan T tabel, di mana t tabel merupakan sebuah tabel distribusi yang digunakan sebagai pembanding untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Untuk dapat menemukan nilai dari t tabel pada penelitian ini, diperlukan perhitungan menggunakan rumus  $T \text{ tabel} = t (a/2 ; n-k-1)$ .

Keterangan :  $n$  = jumlah sampel

$k$  = jumlah variabel x

$a$  = level signifikansi = 0.05

Jumlah sampel ( $n$ ) pada penelitian ini berjumlah 6 sampel yang diambil dari laporan keuangan 6 tahun dari tahun 2015-2020. Jumlah variabel yang digunakan adalah 3 variabel bebas yaitu PAD, belanja modal dan ukuran pemerintah. T tabel yang dihasilkan dari perhitungan rumus tersebut adalah 4,303. Hasil perbandingan yang dilakukan akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan, apakah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya dapat diterima atau tidak. Ketentuan dalam pengambilan keputusan yaitu hipotesis akan diterima jika t hitung lebih

besar dari t tabel maka hipotesis diterima dan jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis ditolak. Dan untuk tingkat signifikansi ditentukan jika nilai signifikansi uji statistik untuk variabel bebas lebih kecil daripada level signifikansi yang telah ditentukan, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengujian Variabel  $x_1$  (Pendapatan Asli Daerah)

T hitung yang dihasilkan yaitu 6.275, dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan t table yang telah didapatkan sebelumnya yaitu 4,303. Nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0.024, di mana lebih kecil dari level signifikansi yang telah ditentukan. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan yaitu variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, dengan begitu hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima.

2) Pengujian Variabel  $x_2$  (Belanja Modal)

T hitung yang dihasilkan yaitu -1.027, dimana hasil tersebut bernilai negatif sehingga lebih kecil dibandingkan dengan t tabel sebesar 4.303. nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan dengan level yang telah ditentukan, yaitu  $0.412 > 0.05$ . Sehingga kesimpulan yang dihasilkan yaitu variabel belanja modal memberikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diambil keputusan bahwa hipotesis kedua (H2) dimana belanja modal

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah ditolak.

### 3) Pengujian Variabel $x_3$ (Ukuran Pemerintah)

T hitung yang dihasilkan yaitu -0.225 di mana hasil tersebut bernilai negatif sehingga lebih kecil dibandingkan dengan t tabel sebesar 4.303. nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan dengan level yang telah ditentukan, yaitu  $0.843 > 0.05$ . Sehingga kesimpulan yang dihasilkan yaitu variabel ukuran pemerintah memberikan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diambil keputusan bahwa hipotesis ketiga (H3) yaitu ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah ditolak.

#### 4.3.3. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh dari variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari analisis koefisien determinasi :

**Tabel 4.3 Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984	.968	.920	.59736

*Sumber : Hasil olah data sekunder, 2021*

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R square ( $R^2$ ) adalah 0.920 atau sebesar 92%. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis koefisien determinasi yaitu variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah (Y). Pengaruh yang diberikan oleh ketiga variabel bebas pada penelitian ini yaitu sebesar 92% dan sisanya sebesar 8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R square ( $R^2$ ) mendekati 1 sehingga pengaruh yang diberikan oleh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat cukup kuat.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil olah data dan pembahasan mengenai penelitian pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan data laporan keuangan tahun 2015-2020, dapat diambil kesimpulan bahwa satu dari tiga hipotesis diterima dan lainnya ditolak. Melalui pengujian hipotesis dengan kriteria yang ditetapkan di mana level signifikansi sebesar 5% dan nilai t-tabel sebesar 4,303 yang digunakan sebagai pembanding t hitung yang dihasilkan, hanya variabel pendapatan asli daerah yang memenuhi syarat untuk diterimanya hipotesis yang diajukan. Kesimpulan yang dihasilkan dari hasil olah data masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

Pada analisis regresi linear berganda, pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien sebesar 11.262, yang memiliki arti bahwa jika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 11.262. Dalam metode analisis menggunakan pengujian hipotesis, t hitung yang dihasilkan yaitu sebesar 6.275 yang berarti lebih besar daripada t tabel yang dihasilkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Variabel pendapatan asli daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.024 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada level signifikansi yang telah ditetapkan, maka PAD memiliki pengaruh positif

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan dapat diterima karena memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk variabel kedua yaitu variabel belanja modal, hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa setiap penurunan belanja modal sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar 1.072. Dalam metode analisis menggunakan pengujian hipotesis, t hitung yang dihasilkan yaitu sebesar -1.027 yang berarti lebih kecil daripada t tabel yang dihasilkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Variabel pendapatan asli daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.412 dimana nilai tersebut lebih besar daripada level signifikansi yang telah ditetapkan, maka belanja modal berpengaruh negatif atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan dapat ditolak karena tidak sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi.

Untuk variabel ketiga yaitu variabel ukuran pemerintah yang menggunakan nilai total aset sebagai tolak ukur, hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa setiap penurunan ukuran pemerintah sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar 1.436. Dalam metode analisis menggunakan pengujian hipotesis, t hitung yang

dihasilkan yaitu sebesar  $-0.225$  yang berarti lebih kecil daripada  $t$  tabel yang dihasilkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Variabel pendapatan asli daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0.843$  di mana nilai tersebut lebih besar daripada level signifikansi yang telah ditetapkan, maka ukuran pemerintah berpengaruh negatif atau tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi. Hasil dari uji  $t$  menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yaitu ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan dapat ditolak karena tidak sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, ketiga variabel bebas pada penelitian ini memiliki pengaruh sebesar  $92\%$  terhadap kinerja keuangan. Jika dilihat dari hasil pengujian hipotesis, hanya satu variabel yang hipotesisnya dapat diterima yaitu variabel pendapatan asli daerah. Variabel tersebut memiliki pengaruh besar pada kinerja keuangan pemerintah pada penelitian ini, karena kinerja keuangan diukur menggunakan rumus desentralisasi fiskal. Rumus desentralisasi fiskal digunakan sebagai indikator penilaian kinerja keuangan dilihat dari sisi kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Dalam rumusnya menggunakan nilai pendapatan asli daerah dibanding dengan total penerimaan daerah, hal tersebut menyebabkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh besar dibanding variabel lainnya. Dengan begitu variabel belanja modal dan ukuran pemerintah tidak memiliki kontribusi besar terhadap kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal tersebut cukup menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran dalam bentuk belanja

modal dan total aset yang dimiliki belum tentu mendukung kemandirian daerah dengan menyumbang jumlah pendapatan asli daerah.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dengan mencoba variabel terikat lain sebagai acuan, karena variabel kinerja keuangan menggunakan rasio desentralisasi fiskal merupakan rasio kemandirian yang diukur berdasarkan PAD. Sehingga pada penelitian ini yang berpengaruh hanyalah variabel PAD, variabel bebas lainnya tidak berpengaruh. Dari penjelasan mengenai aktivitas magang selama 3 bulan, maka penulis ingin memberikan sedikit saran kepada Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Untuk kegiatan magang yang berlangsung sudah cukup jelas penempatan, pemberian arahan, dukungan dan motivasi yang diberikan serta disambut dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian di awal kegiatan magang. Ketika penulis ditempatkan di bidang pengelolaan barang milik daerah, para pegawai pada bidang tersebut mau untuk diajak berdiskusi serta bertukar pikiran. Mereka sangat terbuka terhadap diskusi dan pertanyaan yang diajukan oleh penulis, serta memberikan pendapat dan saran sehingga banyak membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan magang dan penelitian.

Hal yang perlu dievaluasi yaitu pemberian tugas yang seharusnya lebih memiliki level pengerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan pemangang. Tugas yang diberikan terlalu mendasar sehingga penulis kurang mendapatkan esensi utama dalam alur kerja, tugas utama serta fungsi bidang pengelolaan barang milik daerah. Pemangang diminta untuk mencari perbedaan data dan

koreksi mengikuti draft yang benar tanpa dijelaskan lebih lanjut proses selanjutnya setelah koreksi dan ke mana dampak data yang telah dikoreksi tersebut. Kedisiplinan pegawai juga cukup mempengaruhi kinerja pemegang, karena memberikan efek kurang disiplin pada pemegang. Hal tersebut tidak dilakukan evaluasi sehingga para pemegang merasa hal tersebut lumrah dan ditambah dengan tidak adanya pekerjaan atau tugas yang membuat pemegang termotivasi untuk semangat menjalankan kegiatan magang dengan tujuan awal untuk mendapatkan ilmu mengenai pengelolaan barang milik daerah, selain mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja.

Harapannya pemegang dapat memberikan sumbangsih bukan hanya dalam bentuk bantuan fisik, tetapi juga pandangan dari ilmu yang dipelajari. Beberapa kali pegawai mengatakan bahwa mereka bingung ingin memberikan tugas kepada pemegang. Akan lebih baik jika di awal pegawai menjelaskan alur kerja mengenai bidang dan membuat tugas yang terstruktur kepada pemegang dengan adanya target pencapaian. Sebagai contoh memberikan beberapa tugas yang memiliki tingkatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan pemegang, hal tersebut akan membuat pemegang tertantang dan melaksanakan tugasnya secara hati-hati sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Sehingga pengalaman yang didapatkan oleh pemegang akan lebih bermakna dan berguna jika kedepannya pemegang bekerja di bidang yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus Panji Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2, h. 1080–1110.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi*. Di akses dari <http://www.bukittinggikota.go.id/download/keuda>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pada 11.20 WIB.
- BPS (Badan Pusat Statistik).2016. *Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi*. Di akses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/indicator/12/34/1/jumlah-penduduk-kota-bukittinggi.html>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pada 10.40 WIB.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2019. Luas Daerah Kota Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan (Hektar). Di akses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/indicator/153/47/1/luas-wilayah-kota-bukittinggi-menurut-kecamatan.html>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pada 10.52 WIB.
- BPS (Badan Pusat Statistik).2020. Luas Daerah Kota Pariaman Berdasarkan Kecamatan (Hektar). Di akses dari <https://pariamankota.bps.go.id/indicator/153/30/1/luas-daerah-kota-pariaman-berdasarkan-kecamatan.html>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pada 10.55 WIB.
- Damanpour, F. 1991. *Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators*. Academic of Management Journal 34 (3), 550– 590.
- Fahmi, Irham. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Alfabeta. Bandung.

- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
- Lararenjana, Edelweis. 2020. *Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus, Wajib Tahu*. Di akses dari <https://www.merdeka.com/jatim/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilan-sampel-dengan-ciri-khusus-wajib-tahu-klm.html>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pada 20.12 WIB.
- Maiyora, Gita., Yusralini., dan Riska Natariasari. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/ Kota Di Pulau Sumatera)*. Jom FEKOM, 2 (2), hal.1-15.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. E-Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Volume 1 (1).
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Noviyanti, Nur Ade & Kiswanto. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Accounting

Analysis Journal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.  
ISSN 2252-6765.Vol. 5, No. 1.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  
Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah.

Rondonuwu, Giftovel. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi  
Utara Tahun Anggaran 2009-2014*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol.4 No.2.

Siregar . 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudijono, Anas. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada.

Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam  
Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta. Grasindo.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan  
Aplikasi*. Bandung: Agung Medi.

Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang (UU) Nomor 71 tahun 2010 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Data Penelitian

Tahun	PAD Rp	Belanja Modal Rp	Total Aset Rp
2015	66.027.359.716,34	69.174.912.576	1.443.534.285.031,71
2016	71.303.781.735,85	80.926.569.091	1.492.027.311.190,50
2017	102.375.931.332,69	115.736.552.854	1.515.282.417.304,37
2018	101.936.792.226,61	178.010.817.194	1.445.331.498.036
2019	111.896.596.611,05	187.968.455.096,79	1.620.883.912.558,68
2020	84.087.662.500,62	249.317.613.815,34	1.691.506.943.232,61

## Lampiran 2

### Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah Rp	Total Penerimaan Daerah Rp	Rasio Desentralisasi Fiskal
2015	66.027.359.716,34	593.323.296.014,34	11,13%
2016	71.303.781.735,85	647.045.721.855,85	11,02%
2017	102.375.931.332,69	653.374.887.189,69	15,67%
2018	101.936.792.226,61	695.592.067.770,61	14,65%
2019	111.896.596.611,05	734.106.696.896,05	15,24%
2020	84.087.662.500,62	689.222.919.606,62	12,20%

### Lampiran 3

#### Hasil Transformasi Logaritma Natural (Ln) Variabel Pendapatan Asli Daerah

Tahun	PAD Rp	Logaritma Natural (Ln)
2015	66.027.359.716,34	24,91
2016	71.303.781.735,85	24,99
2017	102.375.931.332,69	25,35
2018	101.936.792.226,61	25,35
2019	111.896.596.611,05	25,44
2020	84.087.662.500,62	25,16

### Lampiran 4

#### Hasil Transformasi Logaritma Natural (Ln) Variabel Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal Rp	Logaritma Natural (Ln)
2015	69.174.912.576	24,96
2016	80.926.569.091	25,12
2017	115.736.552.854	25,47
2018	178.010.817.194	25,91
2019	187.968.455.096,79	25,96
2020	249.317.613.815,34	26,24

## Lampiran 5

### Hasil Transformasi Logaritma Natural (Ln) Variabel Ukuran Pemerintah

Tahun	Total Aset Rp	Logaritma Natural (Ln)
2015	1.443.534.285.031,71	28,00
2016	1.492.027.311.190,50	28,03
2017	1.515.282.417.304,37	28,05
2018	1.445.331.498.036	28,00
2019	1.620.883.912.558,68	28,11
2020	1.691.506.943.232,61	28,16

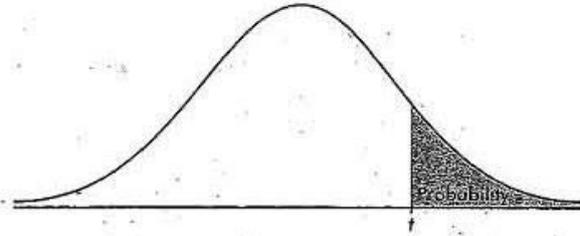
## Lampiran 6

### Perhitungan Nilai T Tabel

Rumus
$T \text{ tabel} = (a/2); n-k-1$
$n = \text{jumlah sampel} = 6$
$k = \text{jumlah variabel } x = 3$
$a = \text{level signifikansi} = 0.05$
Hasil Perhitungan
$T \text{ tabel} = (0,05/2) ; (6-3-1)$
$T \text{ tabel} = 0,025 ; 2$

## Lampiran 7

### Distribusi Nilai T Tabel



**TABLE B: *t*-DISTRIBUTION CRITICAL VALUES**

df	Tail probability <i>p</i>											
	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.02	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	15.89	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6
2	.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60
3	.765	.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92
4	.741	.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.727	.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.718	.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.711	.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.706	.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.703	.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.700	.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.697	.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.695	.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.694	.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.692	.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.691	.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.690	.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.689	.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.688	.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.611	3.922
19	.688	.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.687	.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.686	.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.686	.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.685	.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	.685	.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.684	.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.684	.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707

## Lampiran 8

### Analisis Regresi Linear Berganda

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.605	3	7.202	20.181	.048 <sup>b</sup>
	Residual	.714	2	.357		
	Total	22.318	5			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah (X3), PAD (X1), Belanja Modal (X2)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-202.724	178.734		-1.134	.374
	PAD (X1)	11.262	1.795	1.146	6.275	.024
	Belanja Modal (X2)	-1.072	1.043	-.258	-1.027	.412
	Ukuran Pemerintah (X3)	-1.436	6.398	-.044	-.225	.843

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 <sup>a</sup>	.968	.920	.59736

a. Predictors: (Constant), Ukuran Pemerintah (X3), PAD (X1), Belanja Modal (X2)

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)